

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketimpangan masih merupakan masalah besar dalam pembangunan suatu negara. Berbicara mengenai ketimpangan, ada berbagai macam jenisnya, salah satunya yang sering dibicarakan adalah Ketimpangan Ekonomi. Ketimpangan ekonomi dalam hal ini ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah yang serius di negara-negara berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Dikatakan serius, apabila masalah ini berlarut-larut dan semakin parah sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang serius pula. Masalah ketimpangan ini sangat dipicu oleh beberapa hal antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia, kondisi geografis, dan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah yang ada di Indonesia. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya semakin melebar dan tidak dapat dihindari. Kesenjangan yang semakin melebar akan mengakibatkan konflik sosial antara penduduk kaya dan penduduk miskin.

Myrdal mengatakan bahwa ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah dikarenakan besarnya dampak balik (*backwash effect*) yang ditimbulkan dibandingkan dengan dampak sebar (*spread effect*) (Islami dan SBM, 2018). Kemudian menurut Kuznets (1955) yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan pada tahap-tahap pertumbuhan

awal, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik (*Todaro, 2000 dalam Sutarno dan Kuncoro, 2003*).

Tujuan pemerintah meningkatkan pembangunan tidak disertai dengan pemerataan dalam pendapatan setiap daerah. Untuk mengatasi ketidakmerataan ekonomi pemerintah perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar kalangan ekonomi terbawah bisa menikmati dampak positif dari pertumbuhan ekonomi secara merata. Sumber daya alam yang sangat melimpah seharusnya dapat dimanfaatkan pula dengan maksimal agar harapan seluruh masyarakat dalam mewujudkan kualitas hidup yang baik dapat terealisasi. Karenanya, pemerintah juga perlu memberikan pendampingan dan pemahaman bagi kelompok terbawah agar bisa berdaya dan mandiri. Untuk itu saat ini pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi dengan mencanangkan berbagai program bagi penguatan ekonomi kecil. Semestinya dengan usaha yang dilakukan pemerintah ini, diharapkan keadaan perekonomian saat ini semakin membaik, dengan kata lain distribusi pendapatannya semakin rata. Sehingga penyandang ekonomi lemah akan semakin membaik kualitas kehidupannya.

Kenyataannya berbagai upaya ini belum cukup kuat dalam mengurangi ketimpangan tersebut. Secara nasional, angka ketimpangan pendapatan sebagaimana ditunjukkan oleh angka rasio Gini memang memperlihatkan perbaikan. Namun demikian, perbaikan angka rasio Gini tersebut tidak terjadi secara merata, bahkan di

beberapa daerah Kawasan Timur Indonesia yang menjadi sasaran utama pengurangan ketimpangan ekonomi justru memperlihatkan kondisi sebaliknya, semakin meningkat ketimpangannya. Sebagai contoh, rasio Gini di Papua Barat dalam setahun terakhir naik dari 0,390 pada Maret 2017 menjadi 0,394 (Maret 2018). Penyebab utama terjadinya ketimpangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yakni disebabkan adanya perbedaan karakteristik wilayah yang berpengaruh pada terciptanya pola pembangunan ekonomi, sehingga pola pembangunan di Kawasan Timur Indonesia juga berbeda. Ketidakseragaman ini berpengaruh pada kemampuan tumbuh yang berbeda dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi dalam hal ini pendapatan daerahnya.

Pembuat kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan di Indonesia pada masa orde baru sangat percaya bahwa proses pembangunan ekonomi dengan metode “Efek cucuran kebawah” (*Trickle down effect*) sangat efektif dalam membangun perekonomian. Namun, dalam beberapa tahun terakhir dimulai dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga masa pemerintahan Joko Widodo ketimpangan ekonomi di Indonesia mengalami pergolakan yang sangat dinamis. Hal itu ditandai dengan indeks gini yang mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran pada 2015 sekitar 0,41 dan 2017 sedikit menurun menjadi 0,39. Berikut ini data yang dimaksud.

**Tabel 1.1**  
**Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini**  
**Tahun 2010-2017**

Daerah	Tahun	40% Berpengeluaran Rendah	40% Berpengeluaran Sedang	20% Berpengeluaran Tinggi	Indeks Gini
<b>Kota + Desa</b>	2010	18,05	36,48	45,47	0,38
	2011	16,85	34,73	48,42	0,41
	2012	16,98	34,41	48,61	0,41
	2013	16,87	34,09	49,04	0,41
	2014	17,12	34,60	48,27	0,41
	2015	17,10	34,65	48,25	0,41
	2016	17,02	36,09	46,89	0,40
	2017	17,02	36,09	46,89	0,39

(Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2018)

Terlepas dari angka-angka yang dilaporkan BPS, ketimpangan yang terjadi patut menjadi catatan hitam ekonomi Indonesia dan sebagai bahan pembelajaran yang harus diperhatikan dan dilakukan tindak lanjut yang nyata dan terarah oleh pemerintah serta kerjasama yang baik dari masyarakatnya agar Indonesia menjadi lebih baik lagi perekonomiannya sehingga proses pembangunan akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan yakni mensejahterakan kehidupan bermasyarakat. Selain itu seperti yang telah diketahui bahwa kebijakan yang digunakan untuk mengatasi ketimpangan tidak berubah, masih mengandalkan kebijakan neoliberal plus mekanisme *Trickle Down Effect*. Namun sejauh ini mekanisme tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Di Kawasan Timur Indonesia selama 8 tahun terakhir, ditemukan ada beberapa provinsi yang memiliki nilai rasio gini yang semakin mendekati 0,5. Walaupun masih tergolong ketimpangan sedang namun dikhawatirkan akan semakin meningkat di tahun-tahun yang akan

datang, sehingga target untuk menurunkan ketimpangan pada tahun 2019 tidak akan terwujud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui data rasio gini per provinsi dalam beberapa tahun terakhir, sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Gini Ratio Provinsi Di Kawasan Timur Indonesia**  
**Tahun 2010 - 2017**

PROVINSI	2010 September	2011 September	2012 September	2013 September	2014 September	2015 September	2016 September	2017 September
BALI	0,366	0,387	0,397	0,440	0,442	0,399	0,374	0,379
NUSA TENGGARA BARAT	0,396	0,366	0,354	0,349	0,391	0,360	0,365	0,378
NUSA TENGGARA TIMUR	0,378	0,330	0,358	0,344	0,355	0,348	0,362	0,359
KALIMANTAN BARAT	0,370	0,363	0,395	0,384	0,402	0,330	0,331	0,329
KALIMANTAN TENGAH	0,304	0,334	0,332	0,358	0,365	0,300	0,347	0,327
KALIMANTAN SELATAN	0,366	0,353	0,364	0,356	0,326	0,334	0,351	0,347
KALIMANTAN TIMUR	0,368	0,323	0,363	0,366	0,361	0,315	0,328	0,333
KALIMANTAN UTARA	-	-	-	-	-	0,314	0,305	0,313
SULAWESI UTARA	0,370	0,358	0,430	0,446	0,436	0,366	0,379	0,394
SULAWESI TENGAH	0,366	0,388	0,387	0,391	0,352	0,370	0,347	0,345
SULAWESI SELATAN	0,404	0,427	0,418	0,432	0,448	0,404	0,400	0,429
SULAWESI TENGGARA	0,421	0,389	0,403	0,391	0,399	0,381	0,388	0,404
GORONTALO	0,431	0,400	0,413	0,445	0,453	0,401	0,410	0,405
SULAWESI BARAT	0,364	0,371	0,335	0,324	0,378	0,362	0,371	0,339
MALUKU	0,329	0,356	0,382	0,347	0,330	0,338	0,344	0,321
MALUKU UTARA	0,336	0,343	0,306	0,320	0,322	0,286	0,309	0,330
PAPUA BARAT	0,381	0,374	0,407	0,418	0,405	0,428	0,401	0,387
PAPUA	0,414	0,384	0,446	0,441	0,459	0,392	0,399	0,398

(Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 2018)

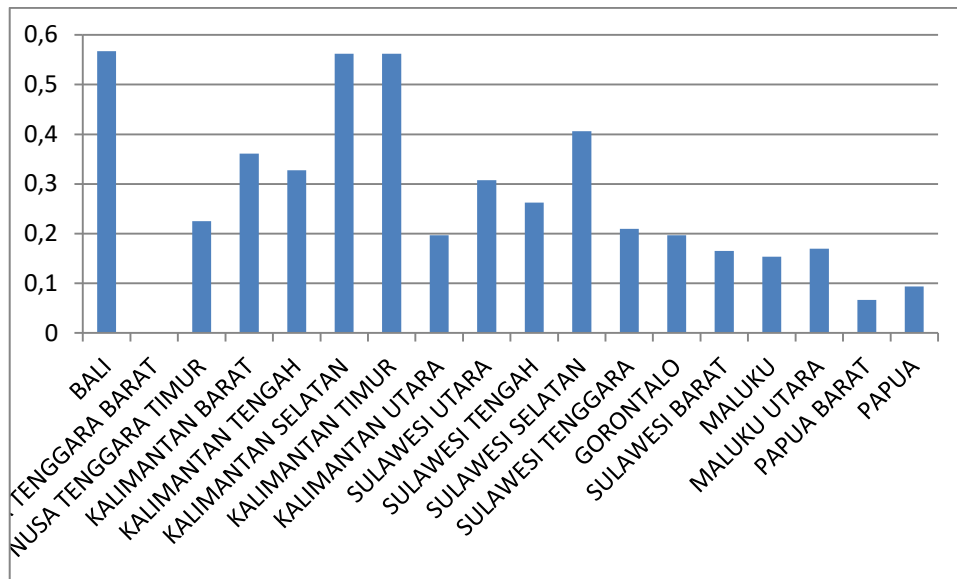
Rasio Gini adalah ukuran ketimpangan distribusi. Rasio Gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1. Nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Tingkat pemerataan pendaatan akan terjadi jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio gini - nya adalah sama dengan nol (Gini ratio = 0). Jadi singkatnya Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pndapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa nilai rasio gini pada Provinsi Gorontalo dan provinsi Sulawesi Selatan sebagai nilai tertinggi dalam Kawasan Timur Indonesia selama 8 tahun terakhir secara signifikan, dikarenakan nilainya yang rata-rata sekitar 0,40 secara terus menerus selama 8 tahun. Ada pula beberapa provinsi yang mengalami pergolakan yang dinamis dalam kurun waktu 8 tahun ini. Contohnya pada Provinsi Bali pada tahun 2010 sampai tahun 2012 nilai rasio gini berkisar pada 0,30 kemudian meningkat pada tahun 2013 dan 2014 yang berkisar pada 0,40 dan berhasil diturunkan nilainya pada tahun 2015 sampai tahun 2017 menjadi rata-rata bernilai 0,30. Sama halnya dengan Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat yang mengalami keadaan serupa dengan Provinsi Bali. Walaupun beberapa provinsi tersebut berhasil menurunkan nilai rasio ginya, namun penurunannya tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu membawa perubahan yang drastis. Adapun pada beberapa provinsi di tahun 2017 tidak mengalami penurunan bahkan mengalami peningkatan nilai rasio gini dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Secara keseluruhan semua Provinsi di Kawasan Timur Indonesia pada akhir tahun 2017 mengalami penurunan nilai rasio gini namun dengan jumlah perubahan yang tidak terlalu besar. Maka dapat disimpulkan bahwa pada Kawasan Timur Indonesia ini masih tergolong timpang disebabkan oleh beberapa wilayah yang mengalami peningkatan nilai rasio gini dan rata-rata nilai rasio gini pada beberapa provinsi makin mendekati 0,5.

Ketimpangan ekonomi tergolong tinggi apabila nilai rasio gininya di atas 0,5 (Iswanto,2013). Keadaan yang ditunjukkan seperti data diatas sangat bertolak belakang dengan apa yang diharapkan yakni terwujudnya ketimpangan ekonomi yang merata.

Salah satu cara dalam mengurangi ketimpangan ekonomi adalah dengan mengidentifikasi indikator-indikator apa saja yang menyebabkan ketimpangan itu sendiri. Menurut Sjafrizal (2012), faktor yang mempengaruhi ketimpangan yaitu perbedaan sumber daya alam, faktor demografis termasuk kondisi tenaga kerja, alokasi dana pembangunan, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, dan mobilitas barang dan jasa (Islami,SBM : 2018). Maka dapat disimpulkan, ada beberapa variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap ketimpangan ekonomi yaitu Tingkat Kemandirian Daerah dalam hal ini keuangannya, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Provinsi.

Tingkat Kemandirian Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Saputra Dori, 2014). Rasio kemandirian daerah diukur dengan besarnya pendapatan asli daerah terhadap jumlah total penerimaan daerah. Berikut adalah data Rasio Kemandirian Provinsi di Kawasan Timur Indonesia :



**Gambar 1.1**  
**Grafik Rasio Kemandirian Daerah Kawasan Timur Indonesia**  
**Tahun 2017**

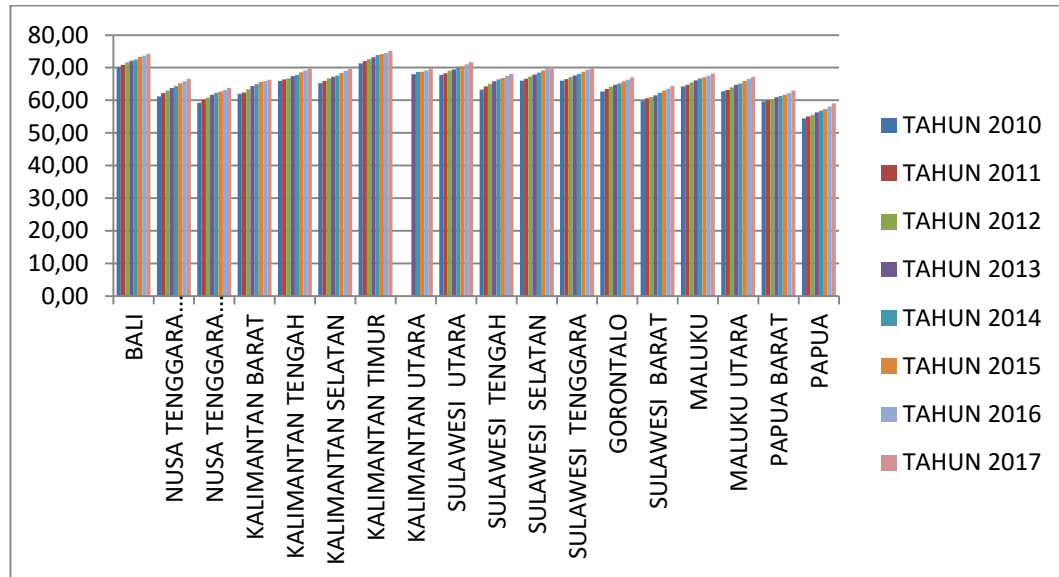
Berdasarkan rasio kemandirian tersebut dapat kita temukan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah di 18 Provinsi Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2013-2017 sangat bervariasi. Dari 18 provinsi tersebut yang paling besar kontribusi pendapatan asli daerahnya nya adalah Provinsi Bali, kemudian Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan yang masing-masing memberikan kontribusi diatas 50 persen. Ini menandakan ketiga provinsi tersebut sudah dapat dikatakan mandiri karena dalam pembiayaan kegiatan daerah tidak lagi bergantung ke dana yang berasal dari pemerintah pusat atau dana eksternal. Namun ini berarti pula bahwa provinsi lainnya masih bergantung pada transfer dana pusat. Seperti pada Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat yang masing-masing pendapatan asli daerahnya hanya memberikan kontribusi dibawah 10 persen. Hal ini menyebabkan ketimpangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia masih tinggi.



Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan begitupun sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan di 18 provinsi ini adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia diikuti upah minimum provinsi di masing-masing daerah. Kualitas Sumberdaya Manusia disini akan diukur dengan Indeks Pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia adalah suatu alat ukur yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dalam hal ini apabila angka Indeks Pembangunan Manusia meningkat artinya semakin berkualitas hidup seseorang maka semakin baik pula Kualitas dirinya. Dalam kurun waktu 8 tahun ini angka indeks pembangunan manusia di 18 provinsi Kawasan Timur Indonesia selalu mengalami peningkatan yang signifikan atau secara terus menerus. Angka indeks pembangunan manusia paling tinggi berada pada Provinsi Kalimantan Timur dan Bali yang hampir mencapai tingkat 80 persen sehingga hal ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kemandirian

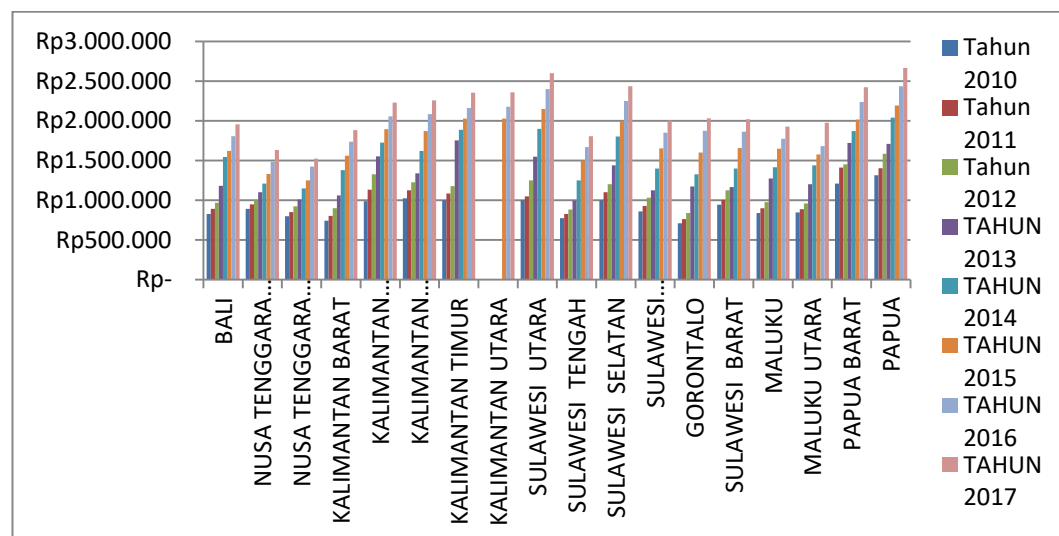
keuangan suatu daerah salah satunya melalui partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Berikut tingkat Indeks Pembangunan Manusia wilayah Timur Indonesia :



**Gambar 1.2**  
**Grafik Indeks Pembangunan Manusia Kawasan Timur Indonesia**  
**Tahun 2010 - 2017**

Upah Minimum Provinsi adalah suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha dan pelaku industri dalam memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Menurut Sumarsono (2003) upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Variabel ini sangat berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia, karena apabila upah minimum di suatu daerah tinggi, maka secara langsung kualitas hidup seseorang dalam

memenuhi kebutuhannya pun akan baik. Dan apabila seseorang sudah menjalani kehidupan yang berkecukupan maka secara tidak langsung akan lebih meningkatkan lagi kemandirian keuangan suatu daerah dan harapan pemerintah mewujudkan pendapatan yang merata akan terwujud. Berikut adalah daftar UMP di 18 Provinsi Kawasan Timur Indonesia :

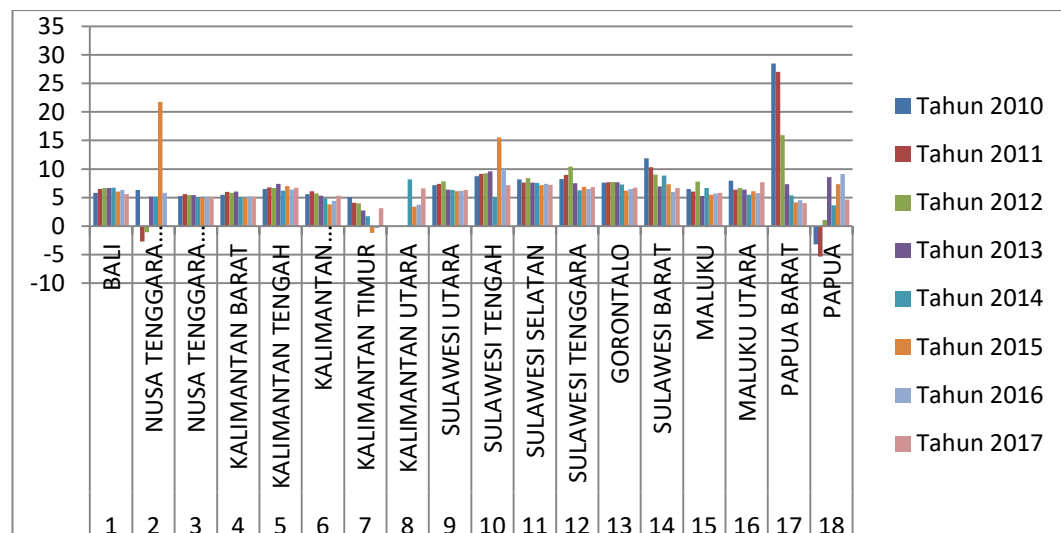


**Gambar 1.3**  
**Grafik Upah Minimum Provinsi di Kawasan Timur Indonesia**  
**Tahun 2010 – 2017**

Grafik 1.3 menunjukkan jumlah kenaikan UMP di setiap daerah pada 18 provinsi selalu meningkat setiap tahunnya. Keadaan ini diharapkan pula dapat berdampak pada meningkatnya kemandirian daerah di masing-masing daerah.

Pertumbuhan Ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila jumlah total output produksi barang dan penyediaan jasa tahun

tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya, atau jumlah total alokasi output tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dibawah ini adalah grafik pertumbuhan ekonomi yang ditinjau dari laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 :



**Gambar 1.4**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia**  
**Tahun 2010 – 2017**

Grafik 1.4 menjelaskan bahwa dari 18 provinsi di Kawasan Timur Indonesia Provinsi Papua barat memiliki nilai tertinggi pada tahun 2010 dan 2011 yakni masing- masing sebesar 28,47 persen dan 27,01 persen. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2010 dan 2011 yakni masing-masingnya sebesar 11,89 persen dan 10,32 persen. Kemudian pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah yang masing-masing sebesar 21,76 persen dan 15,5 persen. Selain dari beberapa provinsi yang telah disebutkan, semuanya memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah 10 persen.

Berdasarkan latar belakang diatas dijumpai bahwa terdapat pengaruh antara Tingkat Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi khususnya di Kawasan Timur Indonesia. Maka dengan ini penulis tertarik untuk menjadikan tema ini agar diangkat sebagai bahan penelitian dalam bentuk proposal dengan judul **“Pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia tahun 2010 – 2017”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang penulis identifikasi berdasarkan latar belakang diatas, antara lain adalah :

- Masih tingginya nilai rasio gini di beberapa provinsi Kawasan Timur Indonesia yang menggambarkan ketimpangan.
- Kontribusi pendapatan asli daerah di sebagian Provinsi di Kawasan Timur Indonesia masih dibawah 50 persen.
- Nilai Indeks Pembangunan Manusia selalu mengalami peningkatan, namun tidak disertai pemerataan ekonomi antar Kawasan Timur Indonesia.
- Pertumbuhan Ekonomi di 18 Provinsi setiap tahunnya menunjukkan pergerakan yang dinamis dan tidak stabil.
- Upah Minimum Provinsi di 18 Provinsi Kawasan Timur Indonesia terus meningkat, naamun tidak disertai dengan pemerataan ekonomi antar Kawasan Timur Indonesia

### **1.3 Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti maka penulis merumuskan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Kemandirian Daerah berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017?
3. Apakah kenaikan Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemandirian Daerah terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017.

3. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia selama tahun 2010-2017.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis dan praktis terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat menjadi acuan dalam proses pembelajaran khususnya bagi mahasiswa, serta dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana keadaan ketimpangan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat menjadi acuan serta referensi bagi pemerintah wilayah Kawasan Timur Indonesia dalam usahanya untuk mengurangi tingkat ketimpangan ekonomi dan untuk pemerataan proses pembangunan di wilayah-wilayah tersebut diatas.